



Buletin

Isen Mullang

Edisi, 295
Mei 2019

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi
PUBLIK Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi
dan Publikasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi
Pemerintahan dan Umum pada Biro
Protokol dan Penyaringan Informasi
dan Publikasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan
Dokumentasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Informasi
Ekonomi, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Staf Pelaksana :

Mulyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih,
Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito
Zuares

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya
Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Daftar Isi :

Presiden Jokowi Kunjungi Kalteng, Lihat Lokasi Calon Ibukota	3
Gub Kalteng : HUT Kalteng 2019 Momentum Gelorakan Peningkatan Kualitas SDM	4
Gubernur Lantik Bupati/Wkl Bupati Gumas Terpilih Periode 2019-2024	6
Provinsi Kalteng Tahun 2018 Kembali Raih Opini WTP	8
Pengprov Kalteng Tata Ulang Wilayah Perbatasan	9
Peringatan "May Day" 2019 Di Kalteng Berlangsung Meriah	9
Studi Komparatif Komisi I DPRD Sumatera Barat tentang SOTK Ke Provinsi Kalteng	10
Sekda Kalteng : Ekosistem Penyangga Penting Untuk Jaga Fungsi Hutan	11
Pemprov Kalteng Siapkan Sejumlah Kebijakan Hadapi Potensi El Nino 2019	12
Gubernur Sugianto Sabran Tegaskan Keberhasilan Otonomi Daerah Sangat Ditentukan Oleh Sumber Daya Manusianya	13
Lonjakan Harga Bawang Merah Picu Naiknya Inflasi Kalteng Capai 0,44 %.	14
Sekda Kalteng : Pengelolaan SDA Perlu Sumbangan Pemikiran & Kompetensi	15
DPRD Kalteng Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Gub Kalteng Akhir T. A 2018	16
Wagub Kalteng : Perlu Deregulasi Untuk Memaksimalkan Penyerapan Anggaran	17
Dinas Ketahanan Pangan Kalteng SOSialisasikan Diversifikasi Pangan Bagi Kelompok Tani dan PKK	18
Sekda Kalteng : Peran Guru Dibutuhkan Dalam Pengembangan Kepariwisataan	18
Gubernur Pantau Pengerjaan Proyek Multy Years Di Kabupaten Katingan	19



biropkp.kalteng.go.id



sekretariat.daerah.kalteng



@biropkp_kalteng



protokol komunikasi publik kalteng



bulletin.isenmulang@gmail.com

Presiden Jokowi Kunjungi Kalteng, Lihat Lokasi Calon Ibukota

Palangka Raya – Biro PKP. Presiden Joko Widodo dan rombongan menggunakan Pesawat Kepresidenan tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Selasa sore Pukul 15.45 WIB (07/05/2019), setelah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya itu disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen Herman Asaribab, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Anang Revandoko, seluruh Bupati/Walikota se-Kalteng dan sejumlah Pejabat Pemprov Kalteng.

Kunjungan kerja Presiden Jokowi yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pramono Anung dan sejumlah Pejabat Tinggi Negara lainnya itu untuk melihat secara langsung salah satu lokasi calon Ibukota Pemerintahan di Kalimantan Tengah.

Presiden Jokowi menjelaskan, dalam peninjauan lokasi calon Ibukota Pemerintahan itu ada beberapa aspek yang harus dilihat antara lain kesiapan infrastruktur, segi sosiologi, lingkungan, kebencanaan dan masalah sosial politik termasuk ketersediaan air, kedalaman gambut dan masalah konstruksinya akan dilihat dan dikalkulasikan oleh tim. "Saya hanya melihat lapangannya, kemudian biar ada feeling nanti dalam memutuskan tidak salah", jelas mantan gubernur DKI itu seusai Shalat Tarawih di Masjid Darul Arqam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Selasa malam (07/05).

Menurut Jokowi, jika bahan-bahan yang diperlukan sebagai acuan pemindahan Ibukota sudah komplit, maka akan segera diputuskan dan keputusan tersebut harus dikonsultasikan dengan DPR RI. "Beberapa aspek yang saya sebutkan tadi jika sudah komplit maka akan kami putuskan, tapi tentu saja ini harus konsultasai dengan DPR", beber Jokowi.

Jokowi mengatakan sejak dulu rencana



pemindahan Ibukota ke Kalteng sudah dipelopori Presiden Pertama RI Ir. Soekarno. Untuk saat ini semua aspek harus dilihat terlebih dahulu. "Visi kami memindahkan Ibukota ke Kalteng ini karena sudah sejak zaman Bung Karno. Beliau dulu memiliki keinginan di Palangka Raya, tapi saat ini harus dilihat lagi", ujarnya.

Presiden Jokowi dan rombongan hari Rabu (08/05/2019) memantau calon lokasi Ibukota Pemerintahan di Segitiga Emas yang meliputi sebagian wilayah Palangka Raya, Gunung Mas dan Kabupaten Katingan dari udara dan darat tersebut diantar langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan sejumlah Pejabat terkait lainnya.

Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sudah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektar yang masuk di sebagain wilayah Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan, bahkan akan ditambah lagi 60 ribu hektar jika dinilai kurang.

Walikota Palangka Raya Fairid Naparin, Bupati Katingan Sakariyas dan Bupati Gunung Mas Arthon S. Dohong menyatakan siap mendukung rencana pemindahan Ibukota Pemerintahan ke Kalimantan Tengah.***



Gub Kalteng : HUT Kalteng 2019 Momentum Gelorakan Peningkatan Kualitas SDM



Palangka Raya – Biro PKP. Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Mei tahun 2019 genap berusia 62 tahun setelah ditetapkan menjadi Provinsi Otonom berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor : 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Mei tahun 1957.

Upacara Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dengan Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, Kamis (23/05/2019).

Peringatan HUT Kalteng tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh Kepala Instansi Pemerintah atau Non Pemerintah, Perwakilan Bank, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kota Palangka Raya, Para Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya, Sesepuh Daerah, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, Pimpinan Parpol, Organisasi Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan, Insan Pers, Pelajar dan Mahasiswa serta ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng.

Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran

dalam sambutannya disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri menjelaskan berbagai kemajuan pembangunan yang telah dirasakan hasilnya oleh masyarakat. “Terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para pendahulu yang berjasa dalam membangun Kalimantan Tengah. Demikian juga kepada seluruh masyarakat yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan dukungan dan partisipasinya berupa tenaga, sumbangan pemikiran maupun kesadaran kolektif untuk selalu memelihara persatuan dan kesatuan serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif sehingga upaya membangun Daerah Kalimantan Tengah dapat terus dilanjutkan”, kata Sugianto Sabran.

Kemajuan dan kejayaan suatu bangsa pada masa yang akan datang tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidikan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya insani merupakan suatu usaha besar dan vital selalu menjadi pusat perhatian setiap negara dan pemimpin yang ingin memajukan bangsanya.

Namun permasalahan bagi keluarga, masyarakat dan

pemerintah dalam mendidik generasi milenial tidaklah mudah dan semakin sulit karena dihadapkan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. “Tantangan dunia pendidikan dalam rangka membangun generasi milenial ke depan adalah bagaimana membentuk generasi milenial yang berwawasan global tanpa kehilangan karakter ke-Indonesiaannya dan tercerabut dari akar budayanya”, terang gubernur.

Sehubungan dengan tantangan dunia pendidikan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengajak Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah untuk mengonsentrasi segenap potensi pendidikan dan sumber daya yang dimiliki dengan menitikberatkan pembangunan SDM yang dilandasi karakter yang kuat, keterampilan dan kecakapan tinggi sehingga rakyat Kalteng khususnya generasi milenial mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif serta lebih siap menghadapi perubahan dan menangkap peluang.

Selain itu, Gubernur Kalteng juga membeberkan kemajuan Kalteng dalam tiga tahun terakhir di berbagai bidang. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah Provinsi Kalteng telah memberikan Kartu JKN Kalteng Berkah sebanyak 90.582 jiwa dan akan

membangun Rumah Sakit kelas A. "Dengan meningkatnya penerima Kartu JKN dan bertambahnya fasilitas kesehatan, diharapkan layanan di bidang kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan taraf kualitas kesehatan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat tidak mampu yang ditolak oleh pengelola fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah", tegas Sugianto Sabran.

Demikian juga bidang sarana dan prasarana telah dilakukan prioritas pembangunan jalan provinsi dengan multi years contract sebesar Rp.1,35 Triliun yang dibagi dalam 3 wilayah terdiri Wilayah Timur 3 ruas jalan, Wilayah Tengah 10 ruas jalan dan Wilayah Barat 9 ruas jalan dalam rangka pemerataan pembangunan sampai ke pelosok pesedesaan dan membuka keterisolasian daerah

Sementara dari sisi Pendapatan Daerah terjadi peningkatan cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2016 sebesar Rp.3,5 Triliun meningkat mencapai Rp. 4,7 triliun pada tahun 2018, sedangkan tahun anggaran berjalan 2019 terjadi serapan cukup tinggi yakni sudah tercapai Rp.1,47 Triliun atau 28,48 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5,15 Triliun.

Pemerintah Provinsi



Kalimantan Tengah pada tahun 2018 dalam Laporan Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-5 kalinya berturut-turut sejak tahun 2014.

Gubernur Kalteng juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada penyelenggara Pemilu yakni KPUD dan Panwaslu, KPPS, TNI POLRI, Polisi Pamong Praja dan Linmas atas terselenggaranya Pemilu yang damai di Kalteng. "Hormat dan simpati serta duka cita dan belangsukawa juga disampaikan kepada Petugas KPPS, Anggota Panwaslu dan Aparat Kepolisian yang telah

gugur dalam menjalankan tugas sebagai pahlawan demokrasi yang sesungguhnya", ujar Sugianto Sabran.

Peringatan Hari Jadi Ke-62 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 diakhiri dengan penyerahan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Pemilik Taman Wisata Dunia yang meliputi Kawasan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia serta penyerahan Sertifikat kepada Taman Nasional Tanjung Puting dengan Kategori Wisata Alam sebagai Kawasan Taman Wisata Dunia yang diserahkan langsung oleh Founder & CEO Yayasan Taman Wisata Dunia Daniel Kumendong kepada Sekda Kalteng Fahrizal Fitri.***



Gubernur Lantik Bupati/Wkl Bupati Gumas Terpilih Periode 2019-2024



PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran atas nama Presiden RI melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas terpilih dalam Pemilu Serentak 2018 untuk Periode 2019-2024 JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si dan Ir. EFRENSIA L.P UMBING, M.Si di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Selasa (28/05/2019).

Gubernur Sugianto Sabran mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Jaya Samaya Monong dan Efrenzia L.P Umbing dapat menjalankan Visi dan Misinya sesuai janji pada saat kampanye untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Gunung Mas dengan berpedoman dan mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai ke pusat.

“Mulai saat ini Saudara memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang besar untuk memimpin Kabupaten Gunung Mas 5 tahun ke depan. Bekerjalah dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat kepada Saudara. Jabarkan dan Implementasikan Visi dan Misi sesuai konteks dan kondisi daerah masing-masing”, pesan gubernur Sugianto Sabran.

Kebijakan yang diambil agar senantiasa bersinerji dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta bekerjasama dengan aparat birokrasi setempat secara profesional dan penuh integritas. “Jadikan momentum pelantikan ini untuk membangun semangat baru dan selalu mengedepankan kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Gunung Mas, Bumi HABANGKALAN PENYANG KARUHEI TATAU, yang kita cintai”, tegas Sugianto Sabran.

Ditegaskan juga agar program-program Kementerian dan Lembaga Pusat di daerah harus dijamin dapat terkonsolidasi dengan baik. Demikian pula berbagai program lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota agar bisa difasilitasi dan disinerjikan dengan sebagi-baiknya. “Tidak ada Kabupaten/Kota yang berjalan sendiri tanpa mengikuti arahan dan program dari Pusat yang turun ke Provinsi dan selanjutnya dari Provinsi sampai ke Kabupaten dan Kota”, terang gubernur.

Demikian juga dalam pengelolaan infrastruktur di daerah diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan adil. Pembangunan infrastruktur harus disertai dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain dengan membuka peluang usaha yang



melibatkan peran serta masyarakat setempat.

Pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan juga harus dapat memberikan kemudahan ataupun bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. "Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu ditolak dari layanan fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah", ujarnya.

Gubernur Kalteng ketika melantik Bupati/Wakil Bupati Gunung Mas tersebut kembali menegaskan komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba serta mengajak seluruh elemen masyarakat agar saling bekerjasama memberantas narkoba. "Saya tegaskan tidak ada ruang gerak bagi peredaran narkoba di Kalimantan Tengah termasuk di Kabupaten Gunung Mas. Tidak ada tawar menawar untuk narkoba karena narkoba adalah racun yang dapat merusak masa depan generasi penerus kita", jelas Sugianto Sabran.

Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada Bupati/Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2014-2019 ARTHON S.DOHONG dan RONY KARLOS yang telah mengabdikan diri untuk masyarakat dan kemajuan pembangunan Kabupaten Gunung Mas.

Pelantikan Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Gunung Mas

Di tempat yang sama seusai pelantikan Bupati dan Wakil Kabupaten Gunung Mas, dilanjutkan dengan Pelantikan Mimi Mariatie Jaya S. Monong sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Gunung Mas masa bhakti 2019-2024 oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran.

Yulistra Ivo kembali mengingatkan bahwa Gerakan PKK mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga. "Pimpinan dan Anggota TP PKK serta Kader



PKK adalah Relawan yang bekerja tanpa pamrih dan turut andil dalam upaya meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera", jelas Yulistra Ivo.

Yulistra Ivo mengajak Para Ketua TP PKK Kabupaten dan Kota untuk membantu menurunkan angka stunting di provinsi Kalimantan Tengah dengan cara merevitalisasi serta mengaktifkan kembali Posyandu dan Dasa Wisma di wilayah masing-masing.

Yulistra Ivo selaku Ketua Dekranasda Kalimantan Tengah mengajak Pengurus dan Anggota Dekranasda Kabupaten/Kota agar senantiasa membina seni kerajinan sebagai warisan budaya

bangsa dengan nilai cita rasa dan perwujudan keanekaragaman etnik yang ada di tanah air serta memberikan kesempatan berusaha dan menghimpun potensi untuk pengembangan produk kerajinan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan Yulistra Ivo kepada Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Gunung Mas masa bhakti sebelumnya seraya berharapa agar keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh Pengurus Baru masa bhakti 2019-2024. ***



Provinsi Kalteng Tahun 2018 Kembali Raih Opini WTP

Palangka Raya – Biro PKP. Provinsi Kalimantan Tengah kembali meraih Opini “Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)” dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018. Opini WTP tersebut merupakan yang ke-5 kalinya diraih provinsi Kalimantan Tengah secara berturut-turut sejak tahun 2014.

Auditor Utama VI BPK RI Dori Santosa, SE, MM mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan SAP Berbasis Akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. “Untuk itu, BPK RI memberikan Opini “Wajar Tanpa Pengecualiaan” atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018”, tegas Dori Santosa pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Senin (20/05/2019).

Namun Auditor Utama VI BPK RI Dori Santosa mengingatkan bahwa pihaknya masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi Kalimantan Tengah diantaranya penetapan besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah belum sesuai realisasi pendapatan serta pengelolaan, pencatatan dan pelaporan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya tertib dan memadai.

BPK RI mengharapkan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, termasuk temuan-temuan sebelumnya maupun temuan-temuan tahun anggaran 2018.

“Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi opini di masa mendatang mengingat akumulasi nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan”, terang Dori Santosa.

Dikemukakan, berdasarkan data statistik BPS Kalimantan Tengah diketahui dalam tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017 dan 2018 tercatat beberapa indikator kesejahteraan di provinsi Kalteng lebih baik dibandingkan dengan beberapa indikator kesejahteraan secara nasional.

Indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah dalam tiga tahun terakhir 6,36 %, 6,74 % dan 5,64 %, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional di tingkat 5,31 %. Tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir di Kalteng tercatat 5,36 %, 5,26 % dan 5,10 %, lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,66 %. Demikian juga tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir 4,82 %, 4,23 % dan 4,01 % di mana tingkat pengangguran di provinsi Kalteng 2018, lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,43 %.

Namun untuk Gini Ratio di Kalteng dalam tiga tahun terakhir berfluktuatif. Hal ini menandakan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kalteng masih di bawah rata-rata nasional. Selain itu Indikator kemakmuran masyarakat seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng tiga tahun terakhir 69,13 %, 69,79 % dan 70,42 %, masih di bawah IPM nasional sebesar 71,39 %. Hal ini menandakan capaian pembangunan manusia juga masih di bawah rata-rata nasional.

“Kami berharap tahun 2019 pemerintah provinsi Kalteng dapat meningkatkan ratio IPM di atas level rata-rata nasional dan menurunkan gini ratio serta mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di bawah angka nasional karena

pencapaian Opini WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat Kalteng belum tercapai”, jelas Dori Santosa.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan tertulis disampaikan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menegaskan, laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan BPK RI secara resmi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah itu sebagai bentuk petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik.

Perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik itu terkait dengan pengelolaan keuangan pada masa mendatang. “Kami berharap dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan, juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah”, kata gubernur.

Pemerintah provinsi Kalteng akan terus berupaya memperbaiki temuan pemeriksaan BPK dan sesegera mungkin secara maksimal menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, gubernur menyerukan kepada para pengelola keuangan dan seluruh jajaran pemprov Kalteng agar bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan PAD serta memperbaiki dan menata pengelolaan keuangan dan aset pada setiap SOPD. “Saya mengharapkan BPK Perwakilan Kalteng agar terus melakukan pembinaan melalui konsultasi, saran dan rekomendasi, dorongan dan arahan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah”, ujar gubernur Sugianto Sabran.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Opini WTP itu diserahkan Auditor VI BPK RI Dori Santoso kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya disaksikan Ketua, Wakil Ketua DPRD dan sejumlah Anggota DPRD Kalimantan Tengah beserta seluruh pimpinan Instansi Vertikal dan SOPD Provinsi Kalteng.***

Pengprov Kalteng Tata Ulang Wilayah Perbatasan

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mulai menata wilayah perbatasan dengan beberapa provinsi tetangga diantaranya dengan provinsi Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bersama Bupati Kapuas Ben Brahim S.Bahat ketika meninjau Tugu Pancasila yang dibangun Pengprov Kalteng tahun 2018 di Km.14 Jalan Trans Kalimantan wilayah Kecamatan Kapuas Timur yang berbatasan dengan provinsi tetangga Kalimantan Selatan mengatakan wilayah perbatasan akan ditata. "Perbatasan akan ditata, bangunan diperindah dengan dibuat monumen atau tugu khusus sehingga tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi destinasi wisata", jelas Gubernur.

Seusai meninjau batas

wilayah dengan Kalsel, Sugianto Sabran yang didampingi sejumlah Pimpinan SOPD provinsi Kalteng dan Bupati Kapuas Ben Brahim meninjau Polsek Kapuas Timur seraya meminta warga masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi menyikapi hasil Pemilu 2019.

Sementara di Kuala Kapuas, Gubernur Sugianto Sabran melantik Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Kapuas di Masjid Agung Al-Muqarram Kecamatan Selat, Kuala Kapuas (22/05/2019). Sugianto Sabran menegaskan komitmennya terus meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kapuas. "Kapuas jadi perhatian kamin dalam pembangunan infrastruktur dan keagamaan" ujar Sugianto.

Mengakhiri kunjungan kerjanya di Kabupaten Kapuas,

Sugianto Sabran menyerahkan bantuan untuk pembangunan sarana keagamaan antara lain Mesjid, Musholla, Langgar, Pesantren, Madrasah dan TPA seluruh Kabupaten Kapuas senilai Rp.4 Miliar.

Sementara itu Bupati Kapuas Ben Brahim juga mengajak warga Kabupaten Kapuas agar tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar pasca pengumuman hasil Pemilu sehingga masyarakat Kapuas tetap memelihara keberagaman dalam suasana aman dan kondusif. "Mari kita jaga situasi Kamtibmas di Kapuas agar tetap aman dan kondusif, jangan mudah terpengaruh dengan berbagai informasi yang tidak jelas kebenarannya", terang Ben Brahim.***

Peringatan "May Day" 2019 Di Kalteng Berlangsung Meriah

Palangka Raya – Biro PKP. Peringatan Hari Buruh Internasional atau "May Day" 1 Mei tahun 2019 tingkat provinsi Kalimantan Tengah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai dengan aksi buruh turun ke jalan menggelar demo atau unjuk rasa.

Tahun ini peringatan "May Day" di Palangka Raya justru dimeriahkan dengan berbagai aksi positif yang melibatkan buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat seperti dialog sosial penguatan pelaku hubungan industrial, jalan sehat dan sepeda santai, tarik tambang, pemeriksaan kesehatan, hiburan dan donor darah.

Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri pada Peringatan Hari Buruh Internasional tersebut menegaskan, pemerintah Indonesia telah memposisikan

keberadaan para buruh/pekerja sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik keberadaan Serikat, Federasi dan Konfederasi Pekerja/Buruh di Kalimantan Tengah. Sebagai wujud pengakuan atas keberadaan berbagai organisasi buruh/pekerja tersebut maka peringatan Hari Buruh Internasional atau "May Day" tingkat provinsi Kalteng 2019 dirayakan dengan menggalang kebersamaan dan kesetaraan melalui acara produktif, menyenangkan dan menghibur sesuai thema May Day 2019 "Together We Grow" dan Sub Thema "Tumbuh Bersama Dalam Kesetaraan Yang Harmonis Melalui Lembaga Tripartit, Mewujudkan Kalteng Berkah".

Gubernur mengharapkan para buruh/pekerja dapat menikmati dan berpartisipasi mengikuti berbagai kegiatan sosial dan perlombaan yang

diselenggarakan panitia dalam suasana santai dan gembira. "Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan sponsor termasuk Palang Merah Indonesia yang telah berkontribusi dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2019 di Kalimantan Tengah", ujar gubernur.

Diharapkan Peringatan Hari Buruh Internasional atau "May Day" tingkat provinsi Kalimantan Tengah 2019 dapat menjadi motivasi untuk membangun dan mengembangkan sinerjitas dan kerjasama Tiga Pilar Pelaku Hubungan Industrial yaitu Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah.

Peringatan Hari Buruh Internasional tingkat provinsi kalteng 2019 di Palangka Raya tersebut dipusatkan di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng diikuti sekitar 1.600 orang meliputi unsur Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perkerja, Pemerintah dan masyarakat.***

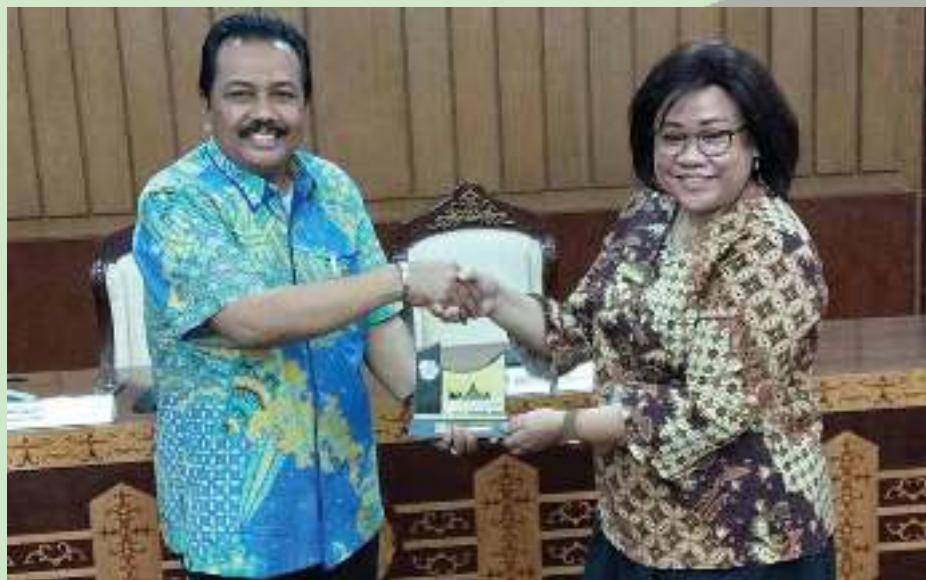
Studi Komparatif Komisi I DPRD Sumatera Barat tentang SOTK Ke Provinsi Kalteng

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. 23 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius Datok Intan Bano melakukan Kunjungan Kerja ke pemerintah provinsi Kalimantan Tengah hari Jumat (17/05/2019).

Kunjungan Kerja sejumlah Anggota Komisi I DPRD Sumatera Barat ke Kalimantan Tengah itu dalam rangka Studi Komparatif tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Provinsi Sumatera Barat. Tim DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut diterima oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriyatun dan sejumlah Pimpinan SOPD provinsi Kalteng di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng.

Endang Kusriyatun dalam pertemuan dengan Anggota Komisi I DPRD Sumatera Barat menjelaskan secara garis besar Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah. “Terdapat dua Perda yang kami miliki yaitu Perda No. 4 Tahun 2016 dan telah diubah dengan Perda No. 1 tahun 2018 dimana beberapa Dinas dan Badan telah mengalami pemisahan”, terang Endang Kusriyatun.

Endang Kusriyatun menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Perda No : 1 tahun 2018 telah memisah beberapa Badan dan Dinas Daerah antara



lain Badan Keuangan dan Aset Daerah sebelumnya menyatu dengan Dinas Pendapatan Daerah. Namun dengan Penerapan Perda No.1 tahun 2018 maka Badan Keuangan dan Aset Daerah terpisah dengan Dinas Pendapatan Daerah. Pemisahan tersebut justru lebih meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah, terbukti penerimaan Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah setiap tahun terus mengalami peningkatan signifikan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius Datok Intan Bano mengemukakan melalui Perda Nomor : 8 tahun 2016 telah menyusun SOTK Sumatera Barat berdasarkan PP No. 18 tahun 2016 sebagai tindak lanjut UU No. 23 tahun 2014. Pemda Sumatera Barat telah menyampaikan beberapa hal strategis kepada DPRD Sumatera Barat menyangkut Rancangan Perda tentang Perubahan Perda No : 8 tahun 2016 dan Komisi

I DPRD Sumatera Barat telah melakukan pembahasan tentang Perubahan Peraturan Daerah tersebut.

Dipilihnya Pemprov Kalteng sebagai lokasi Studi Komparatif karena telah melaksanakan perubahan Peraturan Daerah tentang SOTK tersebut. “Banyak hal yang ingin kami dapatkan terkait dengan mekanisme penetapan perubahan SOTK ini”, beber Arkadius Datok Intan Bano.

Ketua Tim Pembahas Perubahan Perda dan Anggota Komisi I DPRD Sumatera Barat sangat antusias menggali informasi seputar mekanisme Perubahan Tipe dan Pemisahan Dinas-Dinas terkait SOTK dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Perwakilan OPD Provinsi Kalteng secara bergiliran memaparkan dan menjawab berbagai pertanyaan sejumlah Anggota DPRD Sumatera Barat tersebut dengan singkat, padat dan jelas.***



Sekda Kalteng : Ekosistem Penyangga Penting Untuk Jaga Fungsi Hutan

Palangka Raya – Biro PKP. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bersama Universitas Muhammadiyah Palangka Raya melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan proyek Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan (KalFor) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Proyek ini bertujuan untuk membangun, menyelamatkan dan menjaga hutan di luar Kawasan Hutan yang bernilai keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem pada suatu kesatuan lanskap dari dataran rendah ke pegunungan Kalimantan.

Kepala Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaat Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yana Yuhana mengatakan hal tersebut dalam Konsultasi Publik Tingkat Provinsi tentang Penggalian Data dan Informasi Desa Untuk Kawasan Hutan se-Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangka Raya, Jumat

(24/05/2019).

Menurut Yana Yuhana, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat penciptaan keseimbangan yang lebih baik antara pengembangan perkebunan dan perlindungan hutan guna mempertahankan manfaat global yang signifikan untuk konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan lahan berkelanjutan dan mitigasi emisi gas rumah kaca.

Proyek KalFor merupakan upaya lain yang dilakukan pemerintah dengan mengarusutamakan jasa ekosistem hutan dan pertimbangan keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan nasional dan provinsi, proses pengambilan keputusan untuk perencanaan dan pengelolaan hutan di luar kawasan hutan, mengembangkan dan mendemonstrasikan strategi untuk integrasi perencanaan pengelolaan hutan dan konservasi di areal penggunaan lain atau lahan perkebunan di 4 Kabupaten di Kalimantan Tengah.

Selain itu melakukan pengujian/demonstrasi

mekanisme insentif yang inovatif untuk mengurangi deforestasi yang terkait dengan sektor perkebunan serta melakukan manajemen pengetahuan dan evaluasi pemantauan.

Sementara itu Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menjelaskan, mengingat pesatnya pembangunan sektor perkebunan di landskap yang dulunya berupa hutan di wilayah Kotawaringin Barat, maka perlu didata dan dibangun suatu ekosistem penyangga sehingga fungsi hutan di areal Perkebunan Besar Swasta (PBS) tersebut tetap efektif dan dapat terhubung menjadi satu kesatuan koridor satwa.

“Konsultasi Publik ini sangatlah berarti dan penting mengingat tanggung jawab kita bersama-sama untuk mempertahankan keberlanjutan manfaat salah satu hamparan hutan terbaik yang merupakan jantung dan paru-paru dunia bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang”, tegas Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri.***



Pemprov Kalteng Siapkan Sejumlah Kebijakan Hadapi Potensi El Nino 2019.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan World Wide Fund (WWF) Indonesia menggelar Lokakarya Mitigasi Menghadapi El-Nino 2019 Melalui Penguatan Ekonomi di Hotel Global Palangka Raya, Kamis (02/05/2019). Lokakarya dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriyatun itu diikuti Kepala Balai Sebangau, Perwakilan UPT Kementerian Lingkungan Hidup, Universitas Negeri dan Swasta di Palangka Raya, Camat dan Kades serta Manggala Agni BPBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri dalam sambutannya disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriyatun menilai Lokakarya tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan para pihak di provinsi Kalteng terkait dengan mitigasi kebakaran hutan dan lahan mengingat tahun 2015 emisi yang dihasilkan akibat kebakaran hutan dan lahan hampir mencapai 16 juta ton CO₂.

Kebakaran tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kerugian kesehatan dan aktifitas ekonomi akibat kabut asap. "Kesiapsiagaan ini penting mengingat kita akan memasuki musim kemarau dan adanya potensi El Nino tahun 2019. Untuk itu diperlukan kesiapsiagaan para pihak di Kalimantan Tengah dalam upaya mitigasi dan adaptasi kebakaran hutan dan lahan dalam rangka menghadapi potensi El

Nino 2019", tegas Sekda Kalteng.

Menurut Fahrizal Fitri pemerintah provinsi Kalimantan Tengah saat ini tengah mempersiapkan sejumlah kebijakan dan program pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan antara lain melalui Inisiatif Eksekutif (Revisi Perda no. 5 tahun 2013) yang sedang dievaluasi oleh Kemendagri, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Penyusunan Naskah Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Program Kampung Iklim (Proklim) yang bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan peranserta berbagai pihak melalui pelaksanaan aksi nyata sehingga berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

Selain itu melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dijelaskan penggunaan Dana Desa juga dapat diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program serta kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat antara lain untuk kegiatan pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi yang dapat diwujudkan dengan pelatihan kelompok masyarakat Program Kampung Iklim (Proklim), pelatihan relawan tanggap bencana, sosialisasi dan simulasi bencana serta peningkatan

kapasitas masyarakat desa untuk pencegahan dan penaggulangan karhutla. "Lokakarya ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan dan penanganan karhutla serta berbagi pengalaman dan peran antar instansi dan para pihak sehingga kita bisa lebih dini mempersiapkan upaya pencegahan karhutla di bumi Kalimantan Tengah," tutur Fahrizal Fitri.

Sementara itu Direktur Landscape WWF Indonesia Rosehanda Candrakasih menjelaskan Lokakarya tersebut bertujuan mengetengahkan success story atau pembelajaran kegiatan masyarakat yang berhasil dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana respon pemerintah terhadap kegiatan tersebut.

Mitigasi menghadapi El-Nino diperlukan untuk merespon perubahan cuaca dengan suhu udara yang panas disertai hujan angin yang dapat berdampak pada bencana kekeringan ataupun banjir sehingga mempengaruhi perubahan pola iklim serta ancaman pada supply dan kerentanan kemiskinan para perempuan dan anak-anak.

World Meteorology Organization (WMO) mengungkapkan El-Nino yang biasanya terjadi 7 tahun sekali itu akibat efek pemanasan global, kini mengalami perubahan siklus menjadi 2 tahunan dan WMO menyepakati El-Nino dapat berlangsung selama 6-24 bulan. "Dalam lokakarya ini akan dibahas kesiapsiagaan kita serta seberapa buruk resiko yang dihadapi dan rencana jangka panjangnya," terang Rosehanda Candrakasih.***

Gubernur Sugianto Sabran Tegaskan Keberhasilan Otonomi Daerah Sangat Ditentukan Oleh Sumber Daya Manusianya.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Peringatan Hari Otonomi Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dengan Inspektor Upacara Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran yang diikuti Pelajar SMA/MA, SMK dan Mahasiswa, ASN dan TNI/Polri, Kamis (02/05/2019) .

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia sebagai pelaku utamanya.

Karena itu suatu keharusan bagi Aparatur Sipil Negara di daerah agar mampu memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. "Keberhasilan Otonomi Daerah akan tergambar dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", ungkap gubernur.

Otonomi Daerah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah yang seluas-luasnya melalui pengembangan kreativitas dan inovasi. "Muara dari pelaksanaan Otonomi Daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keanekaragaman daerah", beber Sugianto Sabran.

Disebutkan ada tiga prinsip yang berubah dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah yaitu mendorong budaya

demokrasi, menumbuhkan iklim partisipasi aktif masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

Berkaitan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa proses Pemilihan Umum serentak jika dilihat dari sudut pandang pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi setiap warga negara menuju kedewasaan dalam berdemokrasi. "Oleh karena itu sangat penting dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan agar terus mengembangkan nilai-nilai demokrasi sejak dini kepada peserta didik sehingga peserta didik menyadari pentingnya peningkatan akses pelayanan bagi segenap anak bangsa", jelas gubernur.

Pemerintah telah bersungguh-sungguh meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing terutama di daerah terluar, terdepan dan tertinggal. Hal itu dibuktikan dengan terbangunnya sarana pendidikan disertai dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mampu membuka keterisolasi wilayah dengan tujuan utamanya memberikan pelayanan kepada semua masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang mudah dan berkualitas dalam rangka mewujudkan generasi muda yang memiliki keunggulan dan daya saing dalam menghadapi era persaingan global.

Disebutkan, pembangunan ke depan akan bergeser dari

pembangunan infrastruktur ke pembangunan Sumber Daya Manusia sehingga sektor pendidikan dan kebudayaan akan semakin menemukan urgensinya. "Dalam perspektif ke depan, pembangunan sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada dua penguatan yaitu pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja dalam rangka menyiapkan hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang telah mempengaruhi cara kita hidup, bekerja dan belajar. Perkembangan teknologi yang semakin canggih akan sangat mempengaruhi cara berfikir dan perilaku peserta didik", ungkap Sugianto Sabran.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menjadi tumpuan masa depan bangsa dan Negara. Untuk itu, generasi yang harus berkarakter dan berbudaya, bebas dari narkoba, cerdas, mandiri dan kreatif sehingga menjadi generasi yang siap menerima estafet kepemimpinan bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Upacara Peringatan HUT Otda bersamaan dengan Peringatan Hardiknas dan Harkitnas Tingkat Provinsi Kalteng 2019 itu dimeriahkan dengan atraksi Marching Band Pelajar SMU Muhammadiyah dan SMUN 1 Palangka Raya yang diakhiri dengan tarian massal "Kenyah" dibawakan 3.000 Pelajar SMA dan SMK se-Kota Palangka Raya.***



Lonjakan Harga Bawang Merah Picu Naiknya Inflasi Kalteng Capai 0,44 %.

Palangka Raya – Biro PKP. Komoditas kelompok volatile foods menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit pada Periode April 2019. Berdasarkan data BPS tercatat periode April Kalimantan Tengah mengalami inflasi 0,44% (mtm). Inflasi April 2019 di Kalimantan Tengah ini didorong oleh melonjaknya harga bawang merah di Kota Palangka Raya sehingga terjadi Inflasi sebesar 0,12% (mtm) dan Inflasi 0,16% (mtm) di Kota Sampit.

Kepala Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Ridwan Anhar mengungkapkan hal itu kepada awak media dalam Press Release Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng di Palangka Raya, Jumat (03/05/2019). "Pada April 2019 ini Kalimantan Tengah mengalami inflasi 0,44% (mtm), meningkat jika dibandingkan Maret 2019 yang mengalami deflasi 0,02% (mtm)", ungkap Ridwan Anhar.

Disebutkan, Inflasi Kalteng tersebut selain dipicu oleh melonjaknya harga bawang merah juga dipengaruhi kenaikan harga beras, bawang putih, obat dan

kontrak rumah di Kota Palangka Raya dan Sampit."Bulan April 2019 ini hampir seluruh Kota sampel IHK di Pulau Kalimantan mengalami inflasi. Sampit menjadi kota dengan inflasi tertinggi kedua setelah Banjarmasin. Namun Inflasi Kalteng berada di urutan ketiga di Kalimantan", beber Ridwan Anhar.

Berdasarkan hasil analisa dan survei TPID Kalteng bahwa prospek inflasi ke depannya dipengaruhi pergerakan harga komoditas minyak dunia yang mengalami penurunan sehingga menjadi sinyal harga BBM akan relatif terjaga, sedangkan harga tiket angkutan udara masih pada level yang tinggi.

Pergerakan harga komoditas emas dunia yang mulai meningkat dapat mempengaruhi tingkat harga emas perhiasan dan tingginya lalu lintas barang menjelang lebaran berpotensi menghambat distribusi sejumlah komoditas. Sedangkan prospek komoditas bahan pangan ke depannya dalam menyambut Hari Raya keagamaan berpotensi meningkatnya permintaan terhadap komoditas bahan makanan memasuki Ramadhan yang diiringi dengan lonjakan harga

komoditas bawang dan cabai. "Proyeksi inflasi ke depannya cenderung akan naik selama memasuki Hari Raya keagamaan. Hal ini mengikuti permintaan yang semakin bertambah akibat adanya peningkatan kebutuhan", ungkap Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko.

Sementara itu Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng Jenta mengharapkan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya warga Palangka Raya tidak perlu mengkhawatirkan pasokan beras. "Kualitas beras di stok BULOG bagus dan pasokan di BULOG juga ada yang berasal dari beras lokal daerah Pangkoh dan kualitas beras ini juga sama baiknya dan tidak perlu dikuatirkan. Pemerintah dan jajaran terkait akan menjamin stok beras mencukupi sampai satu minggu setelah Hari Raya", tegas Jenta.

Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara rutin melakukan pemantauan harga pasar dalam menghadapi lonjakan harga dan inflasi Kalteng. "Satgas-satgas diterjunkan untuk melakukan pengawasan di pasar hingga ke wilayah Kabupaten", jelas Jenta.

TPID juga melakukan pengendalian ekspektasi masyarakat melalui Siara Pers, memantau dan menjaga ketersediaan stok termasuk kelancaran distribusi komoditas yang didatangkan dari luar daerah. Selain itu meningkatkan kualitas pemanfaatan kandang penyangga, kolam penyangga dan pasar penyeimbang untuk menjaga kestabilan harga serta program rutin supply chain daging ayam segar beku untuk antisipasi lonjakan harga ayam harga dan kelangkaan daging ayam.***



Sekda Kalteng : Pengelolaan SDA Perlu Sumbangan Pemikiran & Kompetensi

Palangka Raya – Biro PKP. Komite Perdamaian Dunia pada bulan Desember 2018 menobatkan Kalimantan Tengah menjadi Ibukota Paru-Paru Dunia. “Gelar ini membanggakan sekaligus merupakan pembuktian betapa kayanya kita dengan hutan dan sumber daya alamnya. Karena perhatian tertuju kepada kita yang masih punya hutan, namun juga membawa tanggungjawab besar untuk memenuhi harapan tersebut”, jelas Sekda Kalteng Fahrizal Fitri dalam sambutannya disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yuel Tanggara pada Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja Inisiasi Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Perlindungan Satwa Liar dan Keanekaragaman Hayati Katingan-Kahayan di Hotel Aquarius Palangka Raya, Selasa (07/05/2019).

Dijelaskan, globalisasi menghadirkan tantangan persaingan dan pengendalian komoditas disamping persaingan sumber daya manusia. Sementara itu perubahan iklim membuat semua pihak juga harus berhati-hati dalam melaksanakan pembangunan bersamaan dengan mitigasi yang perlu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. “Di satu sisi kita masih berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain kita punya

tanggungjawab besar dalam mengelola hutan”, ujar Sekda.

Hutan di provinsi Kalimantan Tengah masih luas dan sebagian besar masih dikelola oleh perusahaan untuk produksi kayu. Sebagian masyarakat juga masih memanfaatkan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, sambil tetap menjaga fungsi ekologinya”, beber Sekda.

Tantangan besar tersebut memerlukan sumbangan pemikiran dan kompetensi dari berbagai pihak yang berkepentingan sehingga sangat tepat Gubernur menerbitkan Keputusan untuk membentuk Kelompok Kerja Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Katingan – Kahayan, mengingat kawasan tersebut masih memiliki tutupan hutan yang menghubungkan hutan di bagian hilir dengan hutan di bagian hulu. “Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa di Kalimantan Tengah masih terdapat banyak kawasan ekosistem penting yang memerlukan pengelolaan secara kolaboratif dan berkelanjutan”, terang Sekda.

Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 juga mengamanatkan bila diperlukan bisa dibentuk Kelompok Kerja Inisiasi Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial di luar Kawasan Suaka Alam

dan Kawasan Pelestarian Alam. Disebutkan, pemerintah memiliki mandat melakukan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial.

Fahrizal Fitri menilai Lokakarya Penyusunan Pokja Inisiasi tersebut penting bagi tindaklanjut penerbitan Surat Keputusan Kelompok Kerja Penetapan Norma, Standart, Kriteria dan Prosedur untuk kawasan perlindungan dan jenis pengelolaan kawasan ekosistem esensial. “Kita mengharapkan Lokakarya ini memastikan informasi dan rencana kerja disosialisasikan kepada masyarakat sehingga Kelompok Kerja itu nanti bisa berjalan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang akan menjadi model pengelolaan kawasan hutan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya sambil menjaga fungsi-fungsi lingkungan untuk kita semua,” ujarnya..

Namun perlu disyukuri bahwa persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah tahun 2018 hanya 5,17 %, sedangkan tingkat nasional 9,82 %. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 Kalimantan Tengah pada posisi 69,79 dan di tingkat nasional 70,81. “Jadi masih perlu upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia kita”, tegas Fahrizal Fitri.***

DPRD Kalteng Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Gub Kalteng Akhir T. A 2018

Palangka Raya – Biro PKP. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah menyerahkan Rekomendasi DPRD Kalteng atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018. Rekomendasi DPRD Kalteng tersebut diserahkan Ketua Tim DPRD Kalteng Yohanes Fredy Ering kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib H.Said Ismail disaksikan Ketua DPRD Kalteng R.Atu Narang pada Rapat Paripurna Ke - 7 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 di Palangka Raya, Jumat (03/05/2019).

Rekomendasi DPRD Kalimantan Tengah tersebut berupa masukan dan pendapat terhadap LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018. “Rekomendasi tersebut akan kita jadikan acuan dan dasar dalam perbaikan dan pelaksanaan kinerja Tahun 2019 sehingga tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Kalimantan Tengah yang sejahtera dan bermartabat dapat tercapai”, jelas Fredy Ering.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sejak Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 telah menyetujui dan menetapkan tiga Peraturan Daerah Baru. “Peraturan Daerah tersebut penting artinya bagi upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah”, tegas Wakil Gubernur Kalteng Habib H.Said Ismail.

Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah itu meliputi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan



Tengah Tahun 2019-2039 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Kesehatan serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum.

Wagub Kalteng menjelaskan Kementerian Dalam Negeri sedang mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah tentang Perijinan Tertentu. Sedangkan Peraturan Daerah yang sedang dilakukan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri adalah Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Peraturan Daerah yang diajukan pada

Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 yaitu Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kami menyampaikan terimakasih atas bantuan pemikiran dan kerja keras seluruh Anggota Dewan melalui Rapat Paripurna, Rapat Gabungan, Rapat Komisi dan Rapat Dengar Pendapat dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan parapihak terkait dan masyarakat dalam rangka menghimpun data dan informasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat”, ujar Habib H.Said Ismail.***

Wagub Kalteng : Perlu Deregulasi Untuk Memaksimalkan Penyerapan Anggaran

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah telah menetapkan target realisasi penyerapan anggaran masing-masing sebesar 20 % pada Triwulan I, 50 % Triwulan II, 85 % Triwulan III dan 100 % pada tanggal 15 Desember setiap tahun berjalan.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib H. Said Ismail saat membuka Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (07/05/2019) mengingatkan dalam memasuki Triwulan II Tahun Anggaran 2019 agar dilakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran dengan target realisasi per 30 April 2019 sebesar 30%.

Habib H.Said Ismail menegaskan beberapa hal untuk mencapai target realisasi penyerapan anggaran tersebut antara lain capaian realisasi anggaran agar diinput secara online pada Surel Pemerintah yaitu SISMONTEPRA yang berlaku secara nasional dalam rangka transparansi penggunaan anggaran kepada masyarakat. "Tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran agar tetap proaktif memonitor dan mengevaluasi pencapaian anggaran sesuai target yang ditetapkan dan disesuaikan dengan arus kas", tegas Habib Ismail

Selain itu mengevaluasi

capaian realisasi anggaran, mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. "Perangkat daerah yang memiliki proyek atau kegiatan strategis diminta perencanaan kegiatannya seperti time schedule yang realistik dan memperhitungkan hari libur maupun prakiraan kondisi cuaca", beber Wagub.

Rapat TEPRA tersebut bertujuan melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan/stakeholder dalam rangka pengelolaan anggaran khususnya dalam pelaksanaan percepatan penyerapan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN di Provinsi/ Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah.

Selain itu untuk memonitor dan mengevaluasi percepatan realisasi penyerapan anggaran yang telah dilakukan SOPD di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan SOPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Ridwan Manurung menjelaskan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tercatat realisasi penyerapan anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan 14 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah posisi per 30 April 2019 dengan realisasi keuangan 13,81 %

dan realisasi fisik mencapai 17,48 %. Penyerapan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi realisasi keuangan 19,83% dan fisik 18,90 %. Penerimaan Pendapatan Kabupaten/Kota per 30 April 2019 sebesar Rp 4,39 triliun dari target Rp 16,84 triliun atau 26 %, sedangkan penerimaan pendapatan perangkat daerah pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 526,74 Miliar dari target sebesar Rp 1,55 Triliun.

Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang bersumber dari APBD Kalimantan Tengah 2019 bertugas melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan strategis yang langsung ke lapangan maupun dengan permintaan data-data, telah menyepakati pembagian wilayah kegiatan menjadi 5 bagian. Wilayah I meliputi Palangka Raya, Pulang Pisau dan Kapuas, Wilayah II Katingan, Kotawaringin Timur dan Seruyan, Wilayah III Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau sedangkan Wilayah IV Gunung Mas dan Murung Raya serta Wilayah V Barito Selatan, Barito Utara dan Barito Timur.

Anggota tim terdiri dari Inspektorat, Bappedalitang, Badang Keuangan dan Aset Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Biro Administrasi Pembangunan yang akan bertugas memberikan dukungan administrasi dengan melibatkan perangkat daerah. ***



Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Sosialisasikan Diversifikasi Pangan Bagi Kelompok Tani dan PKK

Palangka Raya - Biro PKP. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan sosialisasi diversifikasi pangan bagi Ibu-Ibu Kelompok Tani dan PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (09/05/2019).

Sosialisasi diversifikasi pangan bagi Ibu-Ibu Kelompok Tani dan Anggota PKK Tingkat Provinsi Kalteng tersebut dalam rangka mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk mengembangkan panganerkaragaman konsumsi pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah Sutrisno menjelaskan kualitas konsumsi pangan sangat menentukan kualitas SDM bangsa ini sehingga mampu bersaing dalam komunitas global.

"Selain itu untuk memantapkan kerjasama dan sinergi dalam upaya mewujudkan penganekaragaman dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman", terang Sutrisno ketika membuka Sosialisasi Diversifikasi Pangan tersebut.

Dikemukakan, masalah pangan dan gizi di Indonesia berkontribusi besar terhadap masalah global. Saat ini hampir seluruh negara di dunia menghadapi berbagai bentuk permasalahan gizi. "Baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi, baik gizi makro maupun gizi mikro", beber Sutrisno.

Karena itu, diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan bertujuan selain mengurangi ketergantungan terhadap beras, juga sebagai upaya peningkatan perbaikan gizi

untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.

Penerapan konsumsi pangan yang Beragama, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dimulai dari rumah tangga dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam merubah pola pikir masyarakat ke arah konsumsi pangan yang berkualitas.

Untuk mendukung program tersebut diperlukan terobosan dan kreasi resep pangan B2SA berbasis sumber daya lokal yang aplikatif, murah, simpel dan memenuhi preferensi masyarakat. "Saya mengharapkan peserta sosialisasi dapat memanfaatkan sosialisasi diversifikasi pangan ini sebagai sarana meningkatkan wawasan dan pengetahuan, berlatih dan belajar di bidang pangan", tukas Sutrisno.***

Sekda Kalteng : Peran Guru Dibutuhkan Dalam Pengembangan Kepariwisataan.

Palangka Raya – Biro PKP. Peran Sektor Pendidikan dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional sangat berpengaruh dalam pengembangan potensi pariwisata di Kalimantan Tengah yang dilakukan secara massif dan salah satu upaya pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Tengah itu dengan melibatkan para pendidik melalui Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Guru.

Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menjelaskan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Guru ini merupakan Program Kementerian Pariwisata RI dan sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang dijabarkan dalam Misi Ke-6 yaitu Peningkatan Pendidikan,

Kesehatan dan Pariwisata. "Kurikulum yang sesungguhnya adalah guru yang memberikan wawasan kepada siswa-siswi sebagai generasi masa depan dan memberikan perubahan di bidang pariwisata", ungkap Fahrizal Fitri saat membuka Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Guru di Hotel Neo Palangka Raya, Selasa (30/04/2019).

Fahrizal Fitri menegaskan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Para Guru tersebut untuk meningkatkan Pengetahuan Dasar SDM Kepariwisataan bagi guru sehingga mampu menjadi kader dan agen perubahan dalam pengembangan sektor kepariwisataan di Kalimantan Tengah.

Sementara itu Kabid Pengembangan Destinasi

dan Kelembagaan Pariwisata Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah Tirta mengemukakan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Guru yang diikuti 140 Guru/Tenaga Pendidik SLTA/SMK/MAN sederajat se-Kota Palangka Raya itu bertujuan meningkatkan kualitas SDM Pariwisata melalui Pelatihan Kepariwisataan Bagi Guru dalam rangka membangun sektor kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Tengah. "Kita mendorong peran dan partisipasi tenaga pendidik/guru agar mampu dan siap mendukung pembangunan kepariwisataan sekaligus menjadi tuan rumah yang baik pada saat menyambut kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara", ungkap Tirta.***

Gubernur Pantau Pengrajan Proyek Multy Years Di Kabupaten Katingan.



Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terus berupayamenggenjot pelaksanaan proyek-proyek Multy Years bidang infrastruktur senilai Rp. 1 Triliun 350 Miliar yang tersebar di Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah dalam upaya merealisasikan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran terus memonitor kegiatan pembangunan tersebut untuk memastikan pengrajan proyek-proyek Multy Years bidang infrastruktur yang tersebar di seluruh Kalimantan Tengah itu berjalan sesuai target.

Sugianto Sabran beserta Kepala Dinas PUPR Shalahudin dan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Sri Siswanto melakukan peninjauan terhadap pengrajan proyek infrastruktur jalan yakni Proyek Peningkatan Jalan Pegatan menuju Desa Kampung Tengah Kecamatan Pegatan Kabupaten Katingan, Senin (28/05/2019).

Proyek Peningkatan Jalan Pegatan menuju Kampung Tengah merupakan Proyek Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah yang dikerjakan dalam dua tahun anggaran. Tahap I tahun anggaran 2017 senilai Rp. 4 Miliar dan Tahap II tahun anggaran 2018 senilai Rp.

37.817.668.000,-

Gubernur menegaskan, dirinya terus melakukan pemantauan terhadap pengrajan proyek-proyek yang menggunakan APBD Provinsi dan tersebar di wilayah Kalimantan Tengah. "Proyek Multy Years sebesar 1 Triliun 350 Miliar Rupiah yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Kalimantan Tengah ini, akan kami pantau di sisa masa pemerintahan 2 tahun berjalan ini.

Semoga apa yang kami janjikan kepada masyarakat dan juga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terealisasi, walaupun tidak sepenuhnya maksimal", beber Sugianto Sabran.

Menurut gubernur, pembangunan infrastruktur jalan yang memadai harus disertai dengan pengembangan sektor lainnya termasuk sektor ekonomi sehingga tercipta efek ganda yang positif di sektor lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. "Untuk itu, Saya mengimbau seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah agar tetap bersatu, bahu membahu dan selalu optimis dalam melakukan pembangunan menuju Kalteng Berkah", ujarnya.

Selain meninjau pembangunan infrastruktur, gubernur dan rombongan juga mengunjungi Bank Kalteng Cabang Pembantu Pegatan Kecamatan Katingan Kuala, sekaligus berinteraksi dengan nasabah dan warga masyarakat setempat untuk menjaring informasi dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bahan masukan dan kajian untuk program pembangunan selanjutnya.***



**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Dalam Rangka

Serah Terima Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas
Serta Penyampaian Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas
Masa Jabatan 2019 - 2024.